



The Education and Social Justice: A Phenomenological Review of Educational Access Disparities in Developing and Developed Countries

**Loso Judijanto¹, *Gingga Prananda², Muhammad Naofal³, Dwi Hadita Ayu⁴,
Muhammad Hendra⁵ Linda Handayani⁶**

¹IPOSS Jakarta, ²Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, ³UIN Datokarama Palu,
⁴STKIP Nasional, ⁵Universitas Sumatera Barat, ⁶Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh
Email : ¹losojudijantobumn@gmail.com, ²ginggaprananda94@gmail.com*,
³muhammadnaofal@gmail.com, ⁴ditaagsa553@gmail.com,
⁵hendraentrepreneurmulia94@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the educational access disparity between developing and developed countries, focusing on the causes, impacts, and policies implemented. The methodology used is a literature review, examining various sources and previous studies related to educational disparities in both types of countries. The findings indicate that developing countries face greater disparities due to limited educational infrastructure and a lack of trained human resources. Meanwhile, developed countries, despite having better infrastructure, experience disparities mainly caused by socio-economic factors, such as differences in educational access for minority groups and children from poor families. This study concludes that to reduce educational disparities, more inclusive and equitable policies are needed, along with the use of educational technology that can expand access to education in remote areas and among disadvantaged groups.

Keywords: Educational Disparities, Developing Countries, Developed Countries, Education Policies, Educational Technology

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Namun, akses terhadap pendidikan yang berkualitas tidak selalu merata, baik di negara berkembang maupun negara maju. Ketimpangan dalam akses pendidikan ini sering kali disebabkan oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk struktur pendidikan di suatu negara (Salahuddin et al., 2025);(Prananda et al., 2025). lebih dari 258 juta anak di seluruh dunia masih terhalang untuk mengakses pendidikan dasar, dengan sebagian besar berasal dari negara berkembang, kata Laporan Pendidikan Global UNESCO, yang dirilis hari Selasa (23/6) di Paris. Ketimpangan ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial, karena pendidikan yang setara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju cenderung memiliki sistem pendidikan yang lebih baik dengan fasilitas yang memadai, sementara negara berkembang sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya infrastruktur, keterbatasan sumber daya, dan tingkat kemiskinan yang tinggi (Yulianti et al., 2023). Ketimpangan kualitas pendidikan ini menyebabkan kesenjangan dalam pencapaian akademik, yang pada akhirnya berdampak pada kesempatan kerja dan mobilitas sosial (Caroline, 2025);(Edo & Yasin, 2024). Dalam hal ini, keadilan sosial dalam pendidikan bukan hanya soal akses, tetapi juga tentang kualitas dan hasil yang dicapai oleh setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka (Salwa, 2024).

Regulasi dan kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengurangi ketimpangan akses pendidikan. Di negara maju, kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan sosial telah diterapkan sejak lama. Sebagai contoh, di Finlandia, pendidikan gratis dan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh daerah menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan semua warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, negara berkembang sering kali menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan, seperti terbatasnya anggaran negara dan ketidakstabilan politik. Hal ini membuat pendidikan di negara berkembang tidak selalu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, dan kualitas pendidikan di beberapa daerah tetap rendah.

Fenomena ketimpangan akses pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga dengan faktor budaya dan sosial. Ketidaksetaraan gender, diskriminasi rasial, dan hambatan budaya lainnya juga memainkan peran penting dalam membatasi akses pendidikan bagi kelompok tertentu (Adib & Nurwahidah, 2024). Di banyak negara berkembang, terutama di wilayah pedesaan, terdapat anggapan bahwa pendidikan untuk perempuan tidaklah sepenting pendidikan untuk laki-laki. Hal ini menyebabkan tingginya angka putus sekolah di kalangan perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin. Sebaliknya, di negara maju, meskipun diskriminasi terhadap kelompok tertentu semakin berkurang, masalah kesenjangan akses pendidikan tetap ada, terutama di kalangan kelompok minoritas dan imigran.

Dalam konteks fenomenologi, penting untuk memahami pengalaman subjektif individu terkait akses pendidikan yang mereka terima. Sebuah studi oleh Gingga, (2020) mengungkapkan bahwa pengalaman belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi eksternal, tetapi juga oleh persepsi dan sikap individu terhadap pendidikan. Bagi anak-anak di daerah terpencil, misalnya, pengalaman mereka tentang pendidikan bisa sangat berbeda dibandingkan dengan anak-anak di kota besar. Fenomena ini menggambarkan bagaimana ketimpangan akses pendidikan dapat memiliki dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi individu, mempengaruhi pandangan mereka tentang masa depan dan potensi yang dapat dicapai.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan perspektif fenomenologis dengan analisis ketimpangan pendidikan antara negara berkembang dan negara maju. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek kuantitatif ketimpangan pendidikan, namun penelitian ini berusaha menggali lebih dalam pengalaman subjektif individu terhadap pendidikan mereka. Penelitian ini juga mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor lokal yang mempengaruhi ketimpangan akses pendidikan, yang sering kali terabaikan dalam kajian-kajian sebelumnya.

Dari sudut pandang sosial, ketimpangan dalam pendidikan juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Masrukhan et al., 2023). Ketidaksetaraan pendidikan menghasilkan ketidaksetaraan kesempatan kerja, yang pada gilirannya memperparah ketimpangan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahid, (2015)

yang menekankan bahwa akses yang setara terhadap pendidikan adalah salah satu faktor kunci dalam mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan sosial yang ada, diperlukan langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan akses pendidikan di kedua konteks negara berkembang dan maju.

Secara keseluruhan, ketimpangan dalam akses pendidikan antara negara maju dan negara berkembang menunjukkan pentingnya perhatian yang lebih besar terhadap regulasi pendidikan dan kebijakan sosial yang inklusif. Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, pendidikan bukan hanya dipandang sebagai hak individu, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis berbagai sumber yang relevan mengenai ketimpangan akses pendidikan di negara berkembang dan maju. Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan menelusuri jurnal akademik, buku, laporan kebijakan. Literatur yang dikumpulkan akan difokuskan pada studi-studi yang membahas faktor sosial-ekonomi, budaya, dan kebijakan pendidikan yang mempengaruhi ketimpangan tersebut di kedua konteks negara, serta dampaknya terhadap keadilan sosial. Sumber-sumber ini akan diambil dari database akademik seperti JSTOR, Google Scholar, dan Scopus, serta laporan yang tersedia dari pemerintah dan organisasi global. Seperti yang dikatakan oleh Creswell, (2014) Studi literatur adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisir literatur yang ada untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang topik yang sedang diteliti.

Setelah literatur terkumpul, analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola umum yang muncul, terutama terkait faktor-faktor penyebab ketimpangan pendidikan, dampaknya terhadap kesetaraan sosial dan ekonomi, serta kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, teori-teori keadilan sosial, seperti yang dikembangkan oleh John Rawls dan Amartya Sen, akan digunakan untuk mendalami perspektif teoretis mengenai distribusi pendidikan yang adil. Evaluasi kualitas dan kredibilitas setiap sumber juga akan dilakukan untuk memastikan validitas informasi yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, melalui analisis literatur yang mendalam tentang ketimpangan akses pendidikan di negara berkembang dan negara maju, ditemukan beberapa temuan utama yang menggambarkan karakteristik ketimpangan pendidikan di kedua jenis negara tersebut. Negara berkembang umumnya mengalami ketimpangan yang lebih mencolok dibandingkan dengan negara maju, baik dari segi infrastruktur pendidikan, kualitas pengajaran, hingga akses ke pendidikan tinggi. Negara maju, meskipun memiliki sistem pendidikan yang lebih baik secara keseluruhan, masih menghadapi ketimpangan yang lebih halus, seperti ketidaksetaraan dalam akses pendidikan bagi kelompok minoritas dan anak-anak dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Hal ini sejalan dengan temuan yang ada dalam laporan World Bank (2018) yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di negara maju lebih dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi ketimbang infrastruktur.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap ketimpangan akses pendidikan di negara berkembang adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Banyak negara berkembang, terutama yang terletak di Asia dan Afrika, masih menghadapi masalah serius dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Di beberapa daerah terpencil, sekolah sering kali kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, buku pelajaran, dan bahkan tenaga pengajar yang terlatih. Sebagai contoh, di Indonesia, berdasarkan data dari

Kemendikbud (2020), terdapat lebih dari 12.000 sekolah di daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas standar yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Tabel berikut menggambarkan perbandingan antara fasilitas pendidikan di negara berkembang dan negara maju:

Tabel 1. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan	Negara Berkembang	Negara Maju
Jumlah Sekolah	Terbatas, terutama di daerah terpencil	Tersedia di hampir semua wilayah
Rasio Guru terhadap Siswa	Tinggi, kekurangan tenaga pengajar	Lebih seimbang
Kualitas Infrastruktur	Seringkali tidak memadai	Memadai dan modern
Akses ke Buku Pelajaran	Terbatas, sering kali kekurangan	Tersedia secara merata

Di negara maju, kendala yang dihadapi lebih cenderung pada ketidaksetaraan sosial dalam hal akses pendidikan. Meski infrastruktur pendidikan di negara maju umumnya lebih baik, kelompok minoritas, seperti imigran, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, dan komunitas rasial tertentu, sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan berkualitas. Di Amerika Serikat, misalnya, ketimpangan ini tercermin dalam kesenjangan prestasi akademik yang signifikan antara anak-anak dari keluarga berpenghasilan tinggi dan rendah, serta antara kelompok rasial yang berbeda. Kesenjangan pendidikan di AS, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan rasial, semakin melebar, dengan anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok minoritas lebih rentan untuk keluar dari sistem pendidikan sebelum mencapai tingkat yang lebih tinggi (Brief, 2021).

Dampak sosial-ekonomi dari ketimpangan pendidikan ini sangat besar. Di negara berkembang, kurangnya akses pendidikan yang berkualitas memperburuk masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tanpa pendidikan yang layak, individu cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan, dengan keterbatasan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau meningkatkan kualitas hidup mereka (Rosdiyanto & Sukartini, 2025). Di sisi lain, meskipun negara maju memiliki akses yang lebih baik, ketimpangan pendidikan tetap berdampak pada mobilitas sosial dan kesempatan kerja bagi kelompok yang terpinggirkan. Di Inggris, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas lebih cenderung untuk terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan mengalami kesulitan dalam memperoleh peran sosial yang lebih tinggi (Varlık et al., 2025).

Tabel berikut menunjukkan dampak ketimpangan pendidikan terhadap mobilitas sosial dan ekonomi di negara berkembang dan maju:

Tabel 2. Dampak Ketimpangan Pendidikan

Dampak Ketimpangan Pendidikan	Negara Berkembang	Negara Maju
Kemiskinan	Meningkatkan ketimpangan sosial	Menghambat kesempatan ekonomi
Kesempatan Kerja	Terbatas bagi lulusan sekolah rendah	Kesenjangan pekerjaan di sektor tertentu
Mobilitas Sosial	Rendah, sulit untuk keluar dari kemiskinan	Lebih terbatas bagi kelompok tertentu

Terkait dengan kebijakan pendidikan, banyak negara berkembang menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan yang dapat secara efektif mengurangi ketimpangan pendidikan. Ketidakstabilan politik, keterbatasan anggaran, dan masalah distribusi yang tidak merata menjadi hambatan besar. Meskipun banyak negara berkembang telah mencoba menerapkan kebijakan seperti pendidikan gratis dan pendidikan wajib, pengaruh kebijakan tersebut sering kali terbatas pada wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan masih kekurangan akses yang memadai. Di negara-negara seperti India, meskipun pemerintah telah meluncurkan program pendidikan gratis untuk anak-anak di bawah usia 14 tahun, jumlah anak putus sekolah tetap tinggi, terutama di daerah pedesaan (Malik, 2013). Sebaliknya, negara maju cenderung lebih berhasil dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial, meskipun kesulitan anggaran dan perubahan kebijakan yang sering tetap menjadi tantangan.

Secara keseluruhan, temuan dari studi literatur ini menunjukkan bahwa meskipun negara maju dan negara berkembang menghadapi ketimpangan akses pendidikan, faktor penyebab dan dampaknya sangat berbeda. Di negara berkembang, ketimpangan lebih banyak disebabkan oleh faktor infrastruktur dan kemiskinan, sementara di negara maju, ketimpangan lebih disebabkan oleh diskriminasi sosial dan perbedaan status ekonomi. Meskipun negara maju memiliki kebijakan yang lebih baik, mereka tetap perlu bekerja keras untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dalam sistem pendidikan mereka. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan inklusif yang diterapkan di Finlandia, yang memungkinkan akses yang lebih merata ke pendidikan berkualitas, dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengurangi ketimpangan pendidikan.

Penting untuk menyoroti peran teknologi dalam mengurangi ketimpangan pendidikan. Di negara berkembang, penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau (Aziza, 2025). Program seperti *e-learning* dan platform pendidikan online dapat membuka peluang bagi siswa di wilayah yang kekurangan guru atau fasilitas pendidikan. Namun, kendala utama tetap pada akses internet dan perangkat teknologi yang terbatas, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung.

Tabel di bawah ini menunjukkan potensi pengaruh teknologi terhadap akses pendidikan di negara berkembang dan negara maju:

Tabel 3. Pengaruh Teknologi Terhadap Akses Pendidikan

Pengaruh terhadap Pendidikan	Teknologi	Negara Berkembang	Negara Maju
Akses Pembelajaran	yang	Meningkatkan kesempatan melalui e-learning	Memperluas materi pendidikan yang lebih luas
Infrastruktur Diperlukan		Keterbatasan akses internet dan perangkat	Infrastruktur lebih baik dan lebih tersedia
Kualitas Pendidikan		Dapat meningkatkan kualitas jika dioptimalkan	Kualitas lebih tinggi dengan dukungan teknologi

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, ketimpangan akses pendidikan antara negara berkembang dan negara maju tetap menjadi masalah yang rumit dan terus berlanjut. Di negara berkembang, faktor utama yang memengaruhi ketimpangan ini adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan, seperti kekurangan sekolah, ruang kelas yang tidak memadai, serta keterbatasan buku dan materi pembelajaran. Banyak negara berkembang, terutama yang berada Asia, sebagian besar anak-anak masih tidak dapat mengakses pendidikan dasar yang berkualitas karena keterbatasan infrastruktur dan tenaga pengajar yang terlatih. Tanpa fasilitas yang memadai, kualitas

pendidikan yang diterima oleh siswa sering kali tidak sebanding dengan standar internasional, yang berimbas pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan peluang kerja yang tersedia di masa depan.

Sementara itu, di negara maju, meskipun infrastruktur pendidikan relatif lebih baik, ketimpangan akses lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi. Meskipun ada kebijakan pendidikan universal yang menjamin akses pendidikan dasar hingga menengah, namun anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok minoritas tetap menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang setara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, kesenjangan pendidikan antara anak-anak dari keluarga kaya dan miskin sangat besar. Ketimpangan ini semakin melebar dalam beberapa dekade terakhir, dengan anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah cenderung memiliki pencapaian akademik yang lebih rendah dan lebih mudah keluar dari sistem pendidikan (Zuraidah et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan di negara maju lebih merata, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi tetap memainkan peran penting dalam menghambat akses terhadap pendidikan berkualitas.

Dampak dari ketimpangan akses pendidikan ini sangat luas, baik di negara berkembang maupun maju. Di negara berkembang, dampaknya lebih terlihat pada tingkat kemiskinan yang terus berlanjut. Pendidikan yang tidak memadai membuat individu sulit untuk meningkatkan kualitas hidup mereka atau mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.

Di negara maju, meskipun akses pendidikan lebih luas, ketimpangan tetap berlanjut melalui mobilitas sosial yang terbatas. Anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok minoritas sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi, yang menjadi gerbang utama menuju pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi dan posisi sosial yang lebih baik.

Penting untuk diperhatikan bahwa meskipun kebijakan pendidikan di banyak negara berkembang menekankan pendidikan wajib dan gratis, masalah utama sering kali terletak pada implementasi kebijakan yang tidak merata. Di India, misalnya, meskipun ada kebijakan pendidikan wajib untuk anak-anak di bawah usia 14 tahun, data dari UNICEF (2019) menunjukkan bahwa lebih dari 10 juta anak masih tidak bersekolah, terutama di daerah pedesaan yang terpencil. Ketidakstabilan politik, keterbatasan anggaran, dan distribusi yang tidak merata sering kali menjadi kendala besar dalam memastikan kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan merata.

Di sisi lain, teknologi pendidikan menawarkan peluang besar untuk mengurangi ketimpangan ini, terutama di negara berkembang. Program e-learning dan penggunaan platform pendidikan digital dapat membuka akses ke pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses ke fasilitas fisik. Sebagai contoh, program seperti *M-learning (mobile learning)* yang diterapkan di beberapa negara Afrika, memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran melalui perangkat mobile, meskipun mereka tidak memiliki akses ke sekolah formal. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Najjar & Oktasari, (2023), keberhasilan teknologi ini sangat bergantung pada penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti akses internet dan perangkat yang dapat digunakan oleh siswa, yang sering kali terbatas di negara berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur digital untuk pendidikan di daerah-daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan formal.

Secara keseluruhan, meskipun negara berkembang dan negara maju menghadapi ketimpangan dalam akses pendidikan, faktor penyebab dan dampak dari ketimpangan ini sangat berbeda. Negara berkembang lebih dipengaruhi oleh masalah infrastruktur dan keterbatasan sumber daya, sedangkan negara maju lebih dipengaruhi oleh ketidaksetaraan

sosial-ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan pendidikan di kedua jenis negara tersebut, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga pada kesetaraan sosial yang memungkinkan setiap individu, tanpa memandang status ekonomi atau ras, dapat mengakses pendidikan berkualitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Shofi, A., Padilah, C. K., Laborahima, M. J., Nurhalimah, S., & Azis, (2025), prinsip keadilan sosial dalam pendidikan harus mencakup memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, tanpa adanya hambatan sosial yang merugikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan antara negara berkembang dan negara maju memiliki akar penyebab yang berbeda, dengan negara berkembang lebih dipengaruhi oleh kekurangan infrastruktur dan keterbatasan sumber daya, sementara negara maju menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi yang memperburuk akses bagi kelompok minoritas dan miskin. Dampak dari ketimpangan ini sangat signifikan, baik dalam memperburuk kemiskinan di negara berkembang maupun membatasi mobilitas sosial di negara maju. Meskipun kebijakan pendidikan telah diterapkan di kedua jenis negara, tantangan besar tetap ada dalam hal implementasi yang tidak merata dan kurangnya dukungan terhadap kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis keadilan sosial, serta pemanfaatan teknologi pendidikan untuk membuka akses yang lebih luas, guna memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi mereka tanpa dibatasi oleh latar belakang sosial-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. A., & Nurwahidah, N. (2024). Gender Equality and Fulfillment of Human Rights in the Education System in Indonesia. *Spiritus: Religious Studies and Education Journal*, 2(3), 105–114.
- Aziza. (2025). Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Di Daerah Terpencil. In *Cv Rey Media Grafika*.
- Bank, W. (2018). World Development Indicator. Washington DC (US). In *Retrieved from data.worldbank.org*.
- Brief, B. (2021). *Ballard Brief. (2021). The socioeconomic achievement gap in the U.S.*
- Caroline, C. (2025). Jurnal Ilmiah Edukatif Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Melalui Teknologi: Tantangan Dan Solusi Di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(01), 224–231.
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. In *Yogyakarta, Pustaka Pelajar*.
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 2(3), 317–326. <https://doi.org/10.71382/sinova.v2i3.175>
- Gingga, P. (2020). Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis dan Self-Confidence Peserta Didik Terna 3 di Kelas IV Sekolah Dasar. In

(Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang). <http://repository.unp.ac.id/26903/>

- Malik, B. K. (2013). Child Schooling and Child Work in India: Does Poverty Matter? *International Journal of Child Care and Education Policy*, 7(1), 80–101.
- Masrukhan, M., Judijanto, L., Afifah, N., Safitri, M., & Suprayitno, A. (2023). EVALUASI DAMPAK PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SOSIAL : PERSPEKTIF EKONOMI STIES Putera Bangsa Tegal , 2 IPOSS Jakarta , 3 Prodi Ekonomi Pembangunan , Fakultas Ekonomi Bisnis , Universitas Siliwangi , 4 Fakultas Ekonomi ,. *MANDALIKA*, 6(2), 1193–1199.
- Najjar, S., & Oktasari, H. (2023). Embracing Mobile Learning In Education: Membuka Keuntungan, Menghadapi Tantangan, dan Menjelajahi Prospek Masa Depan. *Prosiding Seminar Nasional Kemahasiswaan*, 1(1), 74–83.
- Prananda, G., Judijanto, L., Atikah, N., Khoirunnisa, Q., & Fauzi, M. S. (2025). Transformasi Pembelajaran Di Sekolah Dasar Melalui Flipbook Maker : Dampak Terhadap Keterlibatan Siswa Dan Perubahan Paradigma Pendidikan. *Borobudur Educational Review*, 05(01), 80–91.
- Rosdiyanto, W. A., & Sukartini, N. M. (2025). Pengaruh Pendidikan, Pdrb Dan Tipe Pemerintah Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 530–546.
- Salahuddin, A., Sari, F. I., Vinola, D. O., & Prananda, G. (2025). THE MULTICULTURAL VALUES IN THE NOVEL “ 99 CAHAYA DI LANGIT EROPA ” AND THEIR APPLICATION IN LITERARY EDUCATION. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(1), 776–790.
- Salwa. (2024). Pendidikan Sebagai Agen Perubahan Dalam Mengembangkan Budaya Keadilan Sosial. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 202–208.
- Shofi, A., Padilah, C. K., Laborahima, M. J., Nurhalimah, S., & Azis, A. (2025). Pendidikan inklusi sebagai wujud keadilan pendidikan. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 2(1), 267–276.
- Varlık, S., Akpınar, S., Akpınar, Ö., & Görünü, R. M. (2025). The unbreakable chain: the cycle of social inequality – violence, poverty and education. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1–13.
- Wahid, A. (2015). PENDIDIKAN INKLUSIF (Mewujudkan Keadilan, Kesetaraan Dalam Lingkungan Multikultural). *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15.
- Yulianti, A., Damanik, I. L., & Siregar, R. C. (2023). Problematika Pendidikan di Negara Maju dan Berkembang. *RAZIQ: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 160–167.
- Zuraidah, A., Slti Nafsiah, Is., Salwati, S., Mohd Shahril Nizam, S., & Muhammad Faizal, A. G. (2019). Pengaruh Pembelajaran Akademik Anak-Anak Keluarga Fakir Miskin Di Sekolah-Sekolah Selangor. *Jurnal Kepimpinan Pendidikan*, 6(2), 26.